



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Januari 2020

Halaman: 9

HOTEL MASIH JADI PRIMADONA
Pajak Daerah, Pemkot Targetkan Rp 451 Miliar

YOGYA (KR) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak menjadi salah satu prioritas untuk digenjut sepanjang tahun ini. Pemkot Yogya menargetkan Rp 451 miliar dan berpotensi meningkat saat akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa mengungkapkan target pajak daerah tersebut tertuang dalam APBD 2020. "Dari realisasi sepanjang tahun lalu, target tahun ini memang kami naikan," tandasnya, Jumat (17/1).

Pada tahun 2019 lalu, pajak daerah berhasil terpungut Rp 425 miliar. Total ada 10 pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya. Dari sekian tersebut, pajak hotel selalu menjadi primadona atau penyumbang pajak terbesar.

Wasesa menambahkan, pada tahun ini target pajak hotel juga ditetapkan paling tinggi dibanding yang lain yakni dengan Rp 165 miliar. Target tertinggi kedua ialah PBB sebesar Rp 90 miliar, disusul target bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp 61 miliar, pajak restoran Rp 55 miliar, pajak penerangan jalan Rp 52 miliar, pajak hiburan Rp 13 miliar, pajak reklame Rp 7,3 miliar, pajak parkir Rp 4 miliar, pajak air tanah Rp 2,7 miliar dan terkecil pajak sarang burung walet Rp 6,5 juta.

"Yogya ini merupakan tujuan wisata. Sehingga pajak daerah yang potensial ialah dari akomodasi wisata. Makanya pajak hotel dan restoran selalu tinggi," tandasnya.

Salah satu upaya untuk menggenjut pajak daerah, imbuh Wasesa, ialah dengan lebih mengintensifkan intensifikasi wajib pajak. Upaya itu dilakukan dengan mencari usaha baru di Kota Yogya yang belum tercatat sebagai wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak daerah (NPW-PD). "Setiap ada informasi mengenai usaha baru dan yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari situ, akan kami kejar supaya membayar pajak. Terutama agar segera mengurus NPW-PD," urainya.

Selain itu, celah kebocoran pajak juga menjadi fokus utama untuk ditekankan. Terutama dengan program pemasangan *tapping box* atau sistem e-tax. Tahap awal ditargetkan ada 400 wajib pajak sektor hotel, restoran, parkir dan hiburan yang mampu terpasang *tapping box*. Dengan alat tersebut, setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu akan terekam dalam database Pemkot serta langsung diketahui pajak yang harus disetorkan ke pemerintah.

Program pemasangan *tapping box* ini juga menjadi sorotan dewan. Dalam rapat koordinasi awal tahun 2020, jajaran Komisi B DPRD Kota Yogya mendesak agar program tersebut dijalankan dengan lebih serius. Pasalnya, hingga akhir tahun 2019 baru ada puluhan wajib pajak yang terpasang *tapping box*. Bahkan beberapa alat di antaranya justru tidak terkoneksi dengan baik. (Dh)-o

Instansi

1. **BPKAD**
2.
3.
4.
5.

Netral

Tindak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

a Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005